BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kota Tasikmalaya

Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakandang Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.

Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.

Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.

Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan

Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.

Pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berrdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.

Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.

1.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangakaian

perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai denngan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Periwtiwa ini di tandai dengan penandatangan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesusai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, Pada perkembangan selanjutnya, kecamatan di Kota Tasikmalaya

bertambah dua menjadi sepuluh kecamatan. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Tawang
2. Kecamatan Cihideung
3. Kecamatan Cipedes
4. Kecamatan Indihiang
5. Kecamatan Kawalu
6. Kecamatan Cibeureum
7. Kecamatan Mangkubumi
8. Kecamatan Tamansari
9. Kecamatan Bungursari
10. Kecamatan Purbaratu

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat KotaTasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disyahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang tetama kali.

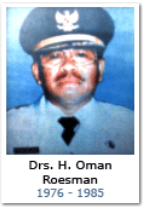
Kemudian, pada tanggal 14 Nopember 2002 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya definitif yaitu Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota dan Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya untuk masa jabatan 2002 - 2007. Pelantikan tersebut merupakan sebuah puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari Tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

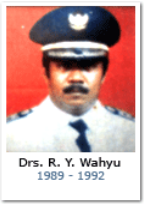
Saat pimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berganti , Pada tanggal 9 September 2007, untuk pertama kalinya warga Kota Tasikmalaya menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, pemenang Pilkada saat itu yakni pasangan Drs. Syarif Hidayat. M.Si sebagai Walikota & Ir. H. Dede Sudrajat, MP sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya yang dilantik pada tanggal 14 Nopember 2007, untuk masa jabatan 2007 – 2012.

Berikut ini urutan pemegang jabatan Walikotatif Tasikmalaya dari terbentuknya kota administratif sampai terbentuknya pemerintah Kota Tasikmalaya :

Tabel 1.1

7 Walikota yang memimpin Pemerintah Kota Tasikmalaya

NO	Nama	Masa Jabatan	Foto
1	Drs. H Oman Roesman	1976 – 1985	 Drs. H. Oman Roesman 1976 - 1985

2	H. Yeng Ds. Partawinata	1985 – 1989	
3	Drs. R. Y. Wahyu	1989 – 1992	
4	H. Erdhi Hardiana	1992 – 1999	
5	Drs. H. Bubun Bunyamin	1999 - 2001	
6	Drs. H. Wahyu Suradiharja	PJ 2001	
7	Drs. H. Bubun Bunyamin	2002 - 2007	
8	Drs. Syarif Hidayat. M.Si	2007 - 2012	

Sumber : www.tasikmalayakota.go.id

1.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

Pada suatu instansi baik swasta maupun pemerintahan pastinya memiliki suatu visi dan misi yang akan mengarahkan suatu instansi tersebut agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Begitupun pada instansi Pemerintahan di lingkungan Kota Tasikmalaya. Berikut visi dan misi dari Kota Tasikmalaya :

A. Visi Kota Tasikmalaya

"Kesejahteraan Masyarakat, dalam Bingkai Iman dan Taqwa"

Penjabaran Visi Kepala Daerah

- **Kesejahteraan masyarakat**
  - Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan terhadap akses pendidikan, kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Social welfare).
  - Tersedianya infrastruktur yang berkualitas secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan infrastruktur yang baik diharapkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi sebagai multiplier effect sehingga ada peningkatan produktivitas di semua sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

- **Bingkai Iman dan Taqwa**
  - Bahwa seluruh aspek dalam kegiatan pembangunan masyarakat menuju sejahtera diatas berada didalam nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan.

B. Misi Kota Tasikmalaya

Sebagai jalan untuk mencapai visi diatas, maka dirumuskan misi pembangunan selama periode lima tahun kedepan, yaitu:

1. **Mewujudkan Kesederajatan Hukum,** yaitu bahwa seluruh komponen pelaku pembangunan (stakeholders) yang terdiri dari pemerintah, rakyat dan swasta memperoleh perlakuan dan kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan:
   a. Hukum adalah pengendali sosial.
   b. Tegak tidaknya hukum sangat bergantung kepada penegak hukum.
   c. Hukum bukan alat bagi penguasa untuk berbuat sewenang - wenang.
   d. Masyarakat diberi hak untuk mengawasi pemerintahan daerah.
   e. Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

2. **Mewujudkan Kesederajatan Ekonomi,** yaitu bahwa peningkatan ekonomi masyarakat bukan diorientasikan untuk golongan tertentu, tetapi juga merupakan hak dari seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat yang merata tersebut tentunya dengan mempertimbangkan:
   a. Bahwa masyarakat berhak atas penghidupan yang layak.
   b. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan berusaha yang aman, sehat dan kompetitif.

c. Bahwa masyarakat berhak memperoleh fasilitas hak-hak ekonomi yang adil dan tidak diskriminatif.
d. Bahwa pemerintah menyediakan prasarana, sarana dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

3. **Mewujudkan Kesederajatan Sosial Budaya,** yaitu pemerataan dampak – dampak positif dari pembangunan terhadap masyarakat sebagai hasil akhir dari kesederajatan hukum dan kesederajatan ekonomi. Pemerataan sosial budaya tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

a. Bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh jaminan perlindungan sosial yang tidak diskriminatif.
b. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan pendidikan yang layak, kompetitif serta tidak diskriminatif.
c. Bahwa masyarakat berhak memperoleh jaminan kesehatan yang baik.
d. Bahwa masyarakat berhak melestarikan dan mengembangkan budaya dengan tidak melanggar norma-norma yang ada.

1.1.3 Logo dan Lambang Kota Tasikmalaya

A. Logo Kota Tasikmalaya

Gambar 1.2

Logo Kota Tasikmalaya



Sumber : **www.tasikmalayakota.go.id**



1. BENTUK DASAR LOGO

Bentuk dasar logo diambil dari bentuk tameng/Perisai yang sudah distilasi (penyederahanaan bentuk). Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh dan telah dibuktikan keampuhannya. Begitu juga pada logo ini tameng dimaksudkan sebagai wadah untuk melestarikan atau melindungi sumbol-simbol masyarakat Kota tasikmalaya.



2. KUBAH MASJID

Sebagai simbol Kota Santri. Penerapan simbol ini sebagai perwujudan dari image atau citra yang sudah melekat di masyarakat, bahwa Kota Tasikmalaya sebagai Kota santri. Disamping itu sejak dahulu Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang paling banyak pesantrennya.



3. GUNUNG

Artinya : Kokoh dan Kuat

Merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Tasikmalaya dari segala guncangan dan gangguan. Gunung digambarkan lebih dari satu untuk mengingatkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai Kota Sepuluh Ribu Bukit. Warna biru pada gunung bermakna kenangan atau panineungan.



4. BANGUNAN /PABRIK

Artinya : Pembangunan

Merupakan simbol keberhasilan Kota Tasikmalaya dari semua aspek kehidupan khususnya dibidang pembangunan. Terbentuknya Kota Tasikmalaya ini juga merupakan salah satu hasil dari perkembangan pembangunan. Penerpan simbol ini juga bermakna sebagai kota yang berkembang menuju kota industri. Jendela berjumlah Tujuh belas bermakna sebagai hari diresmikannya Kota Tasikmalaya yaitu tanggal, 17 Oktober 2001



5. BORDIR BUNGA

Artinya : Harum

Merupakan Simbol kemashuran Kota Tasikmalaya, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, Kota Tasikmalaya menjadi harum dan dikenal. Warna Kuning Mengandung arti keemasan atau kejayaan.



6. ANYAMAN BAMBU

Artinya : Gotong Royong

Merupakan dasar kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya. Penerapan simbol ini sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kebersamaan. Disamping itu juga masyarakat kota Tasikmalaya dikenal dengan kehidupan Gotong Royong.



7. PAYUNG GEULIS

Artinya : Pelindung

Merupakan simbol perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Tasikmkalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupannya. Warna Merah dan Putih Melambangkan bendera yaitu sebagai simbol pemersatu antar etnis, suku dan Agama. Pegangan payung berjumlah lima melambangkan Pancasila sebagai palsafah Negara. Simbol gambanya di ambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.



8. KOTA RESIK

Mengandung makna sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai luhur / filosofi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.dengan Motto " KOTA RESIK".

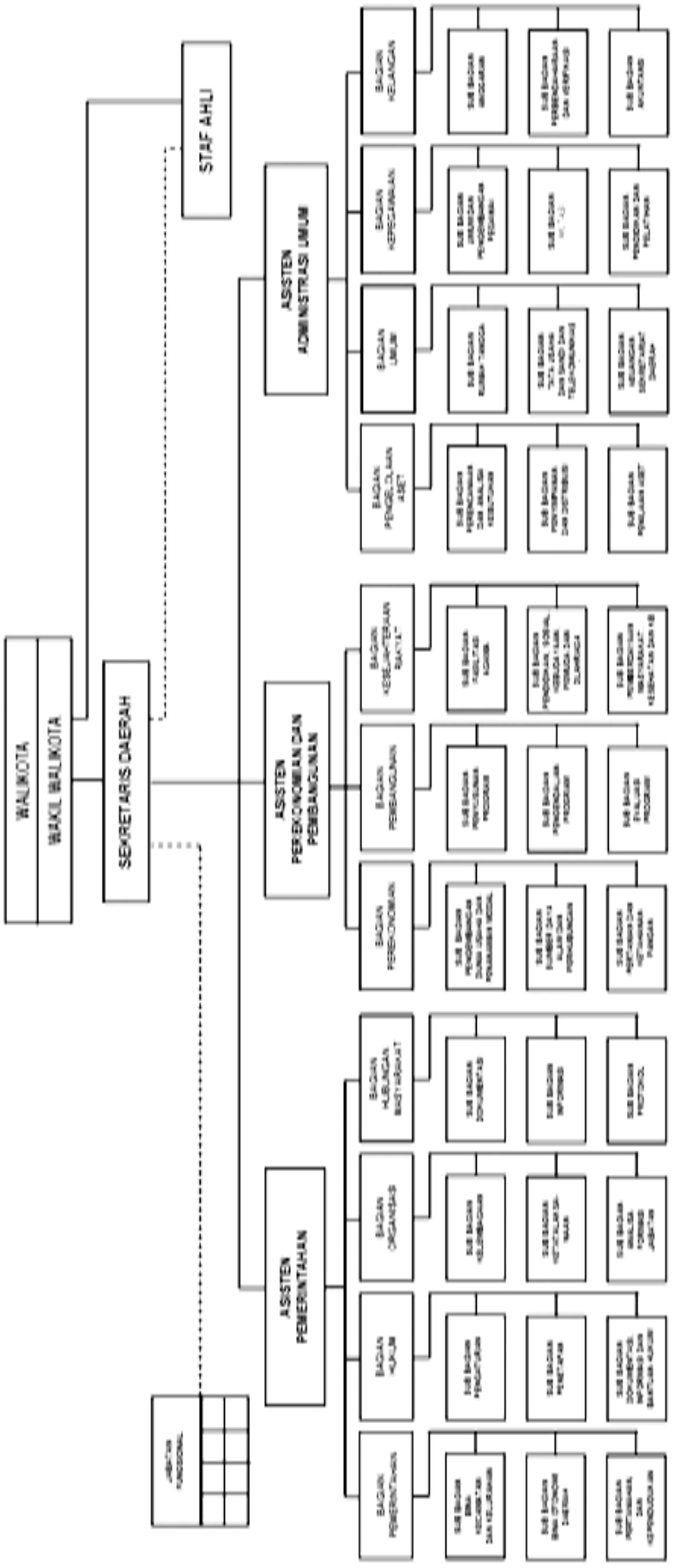
1.2 Sejarah Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Setelah diantikannya Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJS Walikota Tasikmalaya tanggal 18 Oktober 2001, dengan diberlakukannya UUD Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2001, saat itu Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya masih berbentuk Sub Bagian (subag) yang dijabat oleh Adi Supriyadi, S.Sos. Memasuki tahun 2002 setelah proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif maka dilantiknya Kepala Daerah pertama Kota Tasikmalaya Drs. H. Bubun Bunyamin, maka Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah menjadi Bagian yang membawahi Sub Bagian Dokumentasi, Sub Bagian Informasi, dan Sub Bagian Protokol.

1.2.1 Tujuan Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang dokumentasi, informasi dan keprotokolan.

1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya

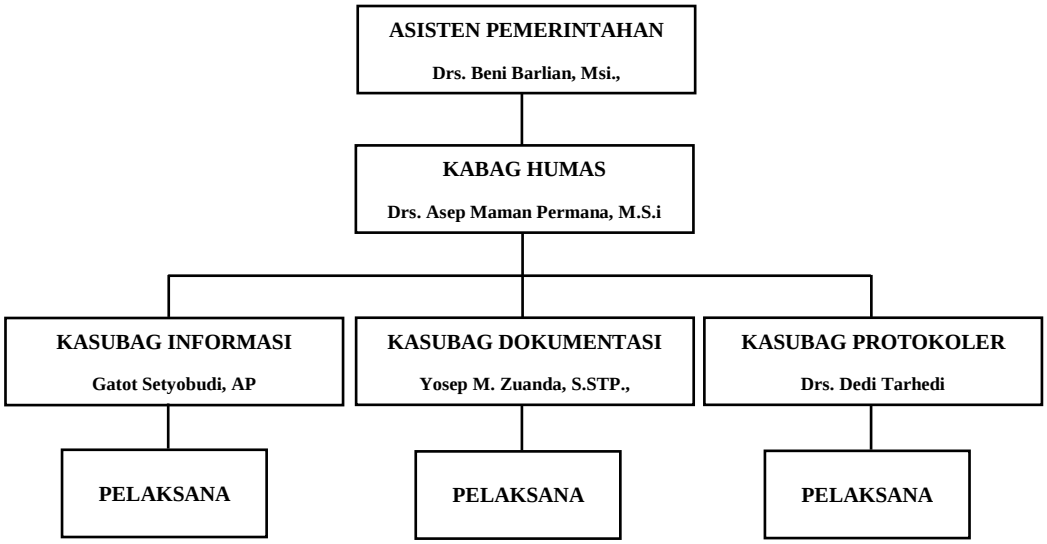


Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dari gambar atau bagan di atas Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, dapat diketahui bahwa Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakannya dibantu oleh Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi dan Umum, dan Staf Ahli.

1.4 Struktur Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Bagian Humas
Kota Tasikmalaya



Sumber : Hasil wawancara dengan staf humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dari gambar / bagan diatas Struktur Organisasi Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bagian Hubungan Masyarakat di kepalai oleh kepala bagian yang membawahi tiga kepala sub bagian yang pertama kepala sub bagian Informasi kedua kepala sub bagian Dokumentasi dan ketiga kepala sub bagian protokoler. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Humas dibantu oleh para

Pelaksana. Masing-masing Sub Bagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 19 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit dan tata kerja sekretariat daerah Kota Tasikmalaya. Pada Struktur Organisasi diatas terlihat juga Bagian Humas berada di bawah atau masih dinaungi oleh Asisten Pemerintahan

1.4.1 Susunan Organisasi Asisten Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

❖ Asisten Pemerintahan :

a. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
   - Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan
   - Sub Bagian Bina Otonomi Daerah
   - Sub Bagian Pertanahan dan Kependudukan

b. Bagian Hukum, membawahkan :
   - Sub Bagian Pengaturan
   - Sub Bagian Penetapan
   - Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Informasi dan Bantuan Hukum.

c. Bagian Organisasi, membawahkan :
   - Sub Bagian Kelembagaan
   - Sub Bagian Ketatalaksanaan
   - Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.

d. Bagian HUMAS, membawahkan :
   - Sub Bagian Dokumentasi
   - Sub Bagian Informasi
   - Sub Bagian Protokol

1.5 Job Deskription Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pasal 17

1 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang dokumentasi, informasi dan keprotokolan.

2 Rincian tugas Bagian Hubungan Masyarakat :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bagian Hubungan Masyarakat.
b. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan informasi dan komunikasi daerah.
e. Menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat .
f. Menyelenggarakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan mengenai kebijakan serta kegiatan pemerintah daerah.
g. Menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan.

h. Menyelenggarakan penyiapan agenda protokoler pimpinan daerah sesuai dengan jadwal kegiatan.
i. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas bagian humas dan merumuskan alternatif pemecahannya.
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian hubungan masyarakat.
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait .
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Dokumentasi.
   b. Sub Bagian Informasi.
   c. Sub Bagian Protokol.

Pasal 18

1. Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rincian tugas Sub Bagian Dokumentasi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Dokumentasi.
   b. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
   c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan.

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pendokumentasian.
e. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan informasi dan komunikasi bagi masyarakat melalui penerbitan tercetak dalam upaya sosialisasi kebijakan pemerintah.
f. Melaksanakan pendokumentasian kebijakan dan hasil kegiatan pemerintah daerah.
g. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Dokumentasi dan merumuskan alternatif pemecahannya.
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi.
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 19

1. Sub Bagian Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyebaran informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rincian tugas Sub Bagian Informasi :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Informasi.
   b. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
   c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan informasi penyelenggaraan pemerintahan.

d. Melaksanakan penyebaran dan sosialisasi kegiatan pemerintah sebagai layanan informasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyebarluasan berita melalui media cetak maupun media elektronik .
f. Melaksanakan penyiapan bahan publikasi kegiatan pemerintah daerah.
g. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang informasi dan komunikasi daerah.
h. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Informasi dan merumuskan alternatif pemecahannya.
i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Informasi.
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 20

1. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan keprotokolan di lingkungan pemerintah daerah.
2. Rincian tugas Sub Bagian Protokol :
   a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Protokol.
   b. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
   c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokol.

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyiapan keprotokolan.
e. Melaksanakan penyiapan dan pengaturan keprotokolan acara resmi pemerintah daerah.
f. Melaksanakan pengurusan dan pengaturan acara kunjungan dan perjalanan tamu negara dan tamu pimpinan daerah.
g. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Protokol dan merumuskan alternatif pemecahannya.
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokol.
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

1.6 Sarana dan Peasarana Bagian Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Adapun Sarana dan Prasarana yang ada di Humas setda Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

- Sarana
    1. Ruang Kepala Bagian Humas.
    2. Ruang Staf Humas
    3. Ruang *Multimedia* menyatu dengan Ruang Tamu

- Prasarana

Tabel 1.2

Prasarana Ruang Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya

No	Prasarana	Unit
1	Komputer staf	4
2	Komputer ruang *multimedia*	5
3	Meja kerja staf	19
4	Kursi staf	19
5	Meja panjang ruang *multimedia*	2
6	Kursi ruang *multimedia*	6
7	Meja tamu	1
8	Sofa tamu	2
9	*Printer*	4
10	*Scanner*	1
11	Telepon	1
12	Kamera DSLR	2
13	*Handycam*	1
14	Televisi	1
15	Mesin Tik	1
16	*Dispenser*	1
17	Lemari Besi	5
18	Lemari Buku Kayu	4

Sumber: Arsip Penulis 2011

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Pemerintah Kota Tasikmalaya Sekretariat daerah bagian Hubungan masyarakat yang terletak di Jl. Letnan Harun No. I Tlp. (0265) 322865 Fax. (0265) 330805 Tasikmalaya 46134. Alamat Website : www.tasikmalayakota.go.id

1.7.2 Waktu PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai dari tanggal 04 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 05 Agustus 2011. Yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB.